

Akselerasi Daya Dukung *E-Procurement* dan Model Penumbuhan Iklim Usaha Daerah berbasis E-Gov

Rachmat Hidayat¹ dan Suji²

Email: kognisi@gmail.com dan kognisi_otak@yahoo.com

Mahasiswa yang terlibat: Taufik Ulfan

Sumber dana: DIPA PTN 2013

ABSTRAK

Salah satu aplikasi E-Government dalam pelayanan public adalah Electronic Procurement (lelang elektronik) yang berusaha untuk memotong mata rantai birokrasi dan membuat belanja sektor publik untuk lebih efektif dan efisien. Penelitian Terdahulu oleh Singer *et al* (2009) menunjukkan bahwa e-Procurement mampu menghemat belanja pemerintah dan membuat proses pengadaan barang dan jasa lebih efisien dan murah. Sedangkan Othman *et al.*(2009) menunjukkan bahwa walaupun e-Procurement bisa menjamin proses pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan akuntabel, namun Pemerintah tetap harus melakukan pengawasan berkelanjutan dalam mencegah maupun mengawasi terjadinya korupsi melalui pemalsuan (*fraught*) dalam proses E –Procurement. Penelitian terkait e-Procurement (e-Proc) di Indonesia belum banyak dilakukan, sehingga penelitian yang akan dilakukan menjadi sangat signifikan untuk menemukan factor apa saja yang dapat menjadi daya dukung dan akselerasi pelaksanaan e-Procurement yang mampu menumbuh kembangkan iklim usaha daerah secara akuntabel dan transparan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui karakteristik inovasi layanan yang menjadi tahapan penting untuk mengetahui kapasitas daerah dalam mengelola aplikasi e-Gov pada pelayanan publik, sehingga dapat menentukan strategi yang tepat dalam memberikan daya dukung yang simultan pada pelaksanaan e-Procurement yang transparan, akuntabel dan mampu menjadi inisiator akselerasi tumbuh kembangnya iklim usaha daerah.

Kata kunci: e-procurement, public service, transparansi, usaha daerah

¹ Prodi administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

² Prodi administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

**Akselerasi Daya Dukung *E-Procurement* dan
Model Penumbuhan Iklim Usaha Daerah berbasis E-Gov**

Rachmat Hidayat³ dan Suji⁴

Email: kognisi@gmail.com dan [kognisi otak@yahoo.com](mailto:kognisi_otak@yahoo.com)

Mahasiswa yang terlibat: Taufik Ulfan

Sumber dana: DIPA PTN 2013

Executive Summary

Salah satu aplikasi E-Government dalam pelayanan public adalah Electronic Procurement (lelang elektronik) yang berusaha untuk memotong mata rantai birokrasi dan membuat belanja sektor publik untuk lebih efektif dan efisien. Penelitian Terdahulu oleh Singer *et al* (2009) menunjukkan bahwa e-Procurement mampu menghemat belanja pemerintah dan membuat proses pengadaan barang dan jasa lebih efisien dan murah. Sedangkan Othman *et al.*(2009) menunjukkan bahwa walaupun e-Procurement bisa menjamin proses pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan akuntabel, namun Pemerintah tetap harus melakukan pengawasan berkelanjutan dalam mencegah maupun mengawasi terjadinya korupsi melalui pemalsuan (*fraught*) dalam proses E – Procurement. Penelitian terkait e-Procurement (e-Proc) di Indonesia belum banyak dilakukan, sehingga penelitian yang akan dilakukan menjadi sangat signifikan untuk menemukan factor apa saja yang dapat menjadi daya dukung dan akselerasi pelaksanaan e-Procurement yang mampu menumbuh kembangkan iklim usaha daerah secara akuntabel dan transparan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui karakteristik inovasi layanan yang menjadi tahapan penting untuk mengetahui kapasitas daerah dalam mengelola aplikasi e-Gov pada pelayanan publik, sehingga dapat menentukan strategi yang tepat dalam memberikan daya dukung yang simultan pada pelaksanaan e-Procurement yang transparan, akuntabel dan mampu menjadi inisiator akselerasi tumbuh kembangnya iklim usaha daerah.

Tujuan riset ini adalah: 1) Menemukan existing condition dan potensi peningkatan layanan e-Gov di Jawa Timur dan mengidentifikasi urgensi e-Procurement di Jawa Timur. 2) Menemukan

³ Prodi administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

⁴ Prodi administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

optimalisasi fungsi dan peluang e-Gov, secara spesifik e-Procurement dalam penumbuhan iklim investasi dan usaha daerah. 3) Menemukan model efektifitas belanja anggaran publik yang transparan dan akuntabel berbasis e-Gov. 4) menemukan model percepatan peningkatan iklim usaha daerah dengan inovasi berbasis e-Gov di Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk melihat fakta alamiah implementasi e-proc di objek riset. Riset ini dilakukan di Kabupaten Sampang, Kota Surabaya, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jember.

Hasil penelitian secara ringkas

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan yang melekat pada proses implementasi *E-Proc* pada empat lokalitas pemerintahan daerah di Jawa Timur. Terdapat dua aspek utama pada proses implementasi *E-Proc* yang dapat menjadi faktor penghambat akselerasi *E-Proc* dan memunculkan potensi korupsi pada proses pelaksanaan *E-Proc*. Dua faktor tersebut muncul pada dua elemen penting pada proses *E-Proc* yaitu *user*, dalam hal ini adalah pengguna barang dan jasa / Kementrian, Lembaga, SKPD, maupun institusi terkait. Kedua, adalah *mediator*, dalam hal ini adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) masing-masing Kementrian, Lembaga, SKPD, maupun institusi terkait. Pada aspek *user* masalah yang dapat diidentifikasi tersebut adalah:

1. Upaya SKPD menarik stafnya dari ULP
2. Usulan paket SKPD ke ULP di luar jadwal
3. SKPD mengajukan spesifikasi teknis, mengarah ke satu merk
4. Rakor cenderung tidak dihadiri SKPD .
5. Pembatalan paket pekerjaan pada saat penjelasan dikarenakan perencanaannya belum final.
6. SKPD mengembalikan pemenang (evaluasi ulang) dengan alasan yang tidak tepat.

Masalah tersebut diatas akan memicu munculnya potensi-potensi penyelewengan dibawah ini :

1. Terjadinya KKN antara SKPD dengan pihak eksternal (vendor/rekanan)
2. Terjadinya KKN antara pihak eksternal ULP dengan SKPD, sehingga dapat dimanfaatkan oleh vendor, politisi dan pihak-pihak yang berkepentingan

Pada aspek mediator masalah yang dapat diidentifikasi tersebut adalah:

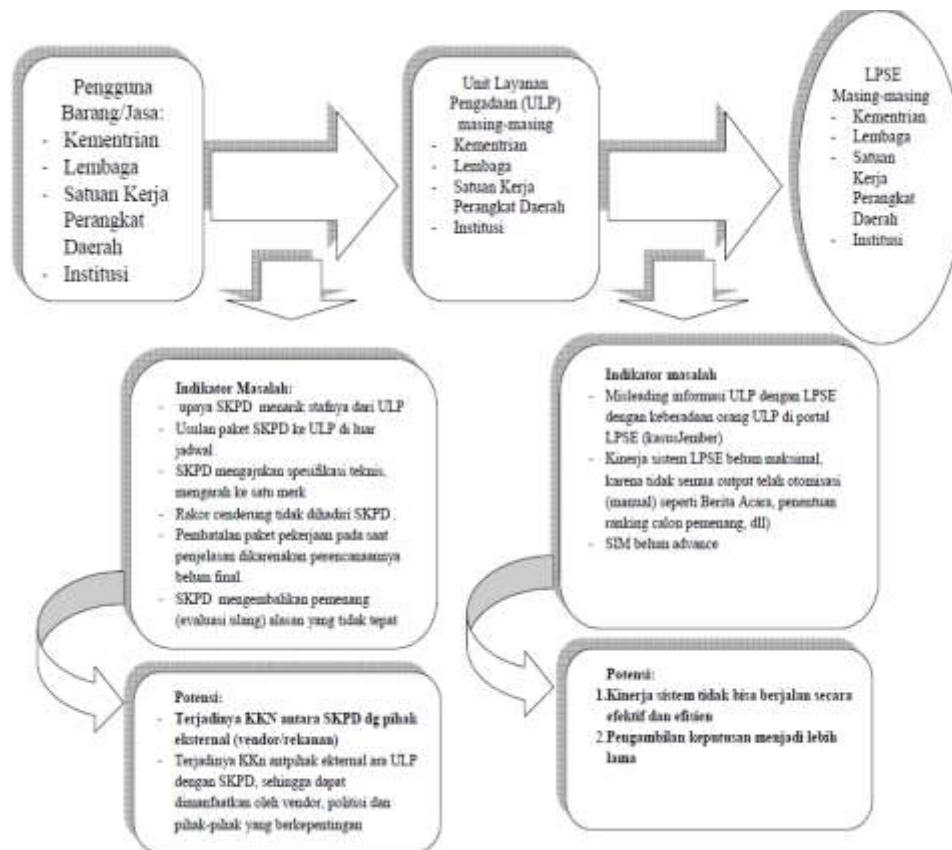
1. *Misleading* informasi ULP dengan LPSE dengan keberadaan personel ULP di portal LPSE

2. Kinerja sistem LPSE belum maksimal, karena tidak semua *output* telah otomatisasi (manual) seperti Berita Acara, penentuan ranking calon pemenang, dll)
3. Sistem informasi manajemen berbasis IT yang belum terintegrasi pada hampir seluruh Pemerintah Daerah, Kecuali Pemkot Surabaya.

Masalah tersebut diatas akan memicu munculnya potensi-potensi penyelewengan dibawah ini :

1. Kinerja sistem tidak bisa berjalan secara efektif dan efisien
2. Pengambilan keputusan menjadi lebih lama

Gambar dibawah ini akan menjelaskan secara ringkas permasalahan yang muncul pada alur implementasi *E-Proc* di empat kabupaten /kota di Jawa timur



Gambar 1. Identifikasi Permasalahan dalam Implementasi alur *E-Procurement* di empat kabupaten /kota di Jawa timur.

Secara singkat, pokok permasalahan yang penting diidentifikasi oleh Peneliti adalah fakta bahwa implementasi *E-Proc* di Indonesia belum bisa memaksimalkan peran ULP sebagai wasit /

mediator dalam proses *E-Proc*. Fakta bahwa ULP adalah salah satu bagian atau kantor dalam domain pemerintah daerah adalah salah satu aspek yang peneliti pandang dapat mengancam proses transparansi dan akuntabilitas dalam *E-Proc*. Peneliti memandang perlu ada demarkasi yang tegas antara mediator dan *user* pada proses *E-Proc*. Bila mediator dan *user E-Proc* diletakkan dalam domain yang sama dalam satu lokalitas pemerintahan daerah, maka potensi terjadinya penyelewengan secara administratif maupun politik besar kemungkinan akan terjadi.

Rekomendasi hasil riset ini adalah *E-Procurement* menjadi penting bagi pemerintah di segala lini agar proses lelang menjadi lebih efisien, efektif dan transparan untuk untuk mengurangi beban biaya, korupsi dan *mis-alokasi* sumber daya publik di era desentralisasi di Indonesia.

Hasil studi tahun pertama yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bagaimana praktek *E-Procurement* di empat kabupaten di Jawa timur (Jember, Kediri, Surabaya dan Sampang) telah mencapai kemajuan pada beberapa aspek tertentu, namun juga menemui beberapa kendala pada aspek tertentu. Beberapa poin tersebut adalah:

1. Ketidakjelasan indikator transparansi dan akuntabilitas pada proses pengadaan,
2. Rendahnya komitmen politik Pemerintah daerah,
3. Ketiadaan sistem *E-Government* yang kompatibel dengan *mainframe E-Procurement* pusat.
4. Lemahnya *internal monitoring* dari pemerintah pusat maupun daerah adalah satu dari sekian aspek yang menjadi titik krusial dalam implementasi *E-Procurement* yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci: e-procurement, public service, transparansi, usaha daerah